

Buletin **BSNP**

Media Komunikasi dan Dialog Standar Pendidikan



PERPRES PPK DAN POSISI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

PENGUATAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL 2018

DAFTAR ISI

- 3 PERPRES PPK DAN POSISI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
- 6 PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL 2018
- 8 PENERBIT ANTUSIAS MENDAFTARKAN PENILAIAN BTP SECARA DARING
- 9 UJI PUBLIK RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI GURU SMK/MAK
- 10 SEKOLAH PELAKSANA UNBK 2018
- 12 PENGUATAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
- 14 IKAPI SAMBUT BAIK PENGADAAN BTP DENGAN POLA INISIATIF MASYARAKAT
- 16 LENSA BSNP



Pembaca yang budiman. Puji dan syukur hanya untuk Allah, atas rahmat dan pertolongan-Nya, Buletin BSNP Edisi IV sebagai edisi terakhir tahun ini dapat diterbitkan tepat waktu. Pada edisi keempat ini, Buletin BSNP menyajikan artikel tentang implikasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) terhadap standar nasional pendidikan dan kurikulum. Secara tegas Pasal 9 dari Perpres tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Jalur Pendidikan Formal dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu. Pada edisi ini pula, kami sajikan berita seputar pengembangan standar nasional pendidikan, ujian nasional, dan penilaian buku teks pelajaran. Lensa BSNP dalam bentuk foto, juga kami sajikan untuk melengkapi edisi ini. Selamat membaca.

REDAKSI

Gambar Sampul: Suasana Pelaksanaan Ujian Nasional Gelombang II pada bulan Oktober 2017 di Provinsi Banten.

Penanggungjawab
Bambang Suryadi

Pemimpin Redaksi
Kiki Yulianti

Redaksi Eksekutif
*Zainal A. Hasibuan
Nanang Arif Guntoro
Zaki Su'ud
Khomsiyah*

Redaksi Pelaksana
Teuku Ramli Zakaria

Penyunting/Editor
*Titi Savitri Prihatiningsih
Erika Budiarti Laconi
Ipung Yuwono
Djoko Luknanto*

Desain Grafis & Fotografer
*Arief Rifai Dwiyanto
Ibar Warsita
Fiqih Trihanda*

Sekretaris Redaksi
*Ning Karningsih
Nurul Najmah*

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

*Gedung D Lantai 2, Mandikdasmen, Jl. RS.
Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan*

Email: info@bsnp-indonesia.org Telp. (021) 7668590

Website: <http://www.bsnp-indonesia.org> Fax. (021) 7668591

PERPRES PPK DAN POSISI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bambang Suryadi*

Pada tanggal 6 September 2017 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Perpres ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan bahkan dalam waktu singkat telah menjadi viral positif yang memberikan angin segar dan harapan baru. Masyarakat juga menilai Perpres ini merupakan keputusan yang bijak sebagai solusi yang menguntungkan (*win-win solution*) terhadap isu yang bergulir, yaitu kebijakan lima hari sekolah yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Secara tegas Pasal 9 dari Perpres tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Jalur Pendidikan Formal dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu. Ketentuan hari sekolah diserahkan pada masing-masing Satuan Pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setempat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam menetapkan 5 (lima)

hari sekolah, Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah mempertimbangkan: (a) kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan, (b) ketersediaan sarana dan prasarana, (c) kearifan lokal, dan (d) pendapat tokoh masyarakat dari/ atau tokoh agama di luar Komite Sekolah/Madrasah.

Lebih penting lagi, dalam Perpres ini secara eksplisit disebutkan delapan belas nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter yang harus ditanamkan kepada peserta didik, yaitu nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Proses penanaman nilai-nilai tersebut, dapat dilakukan melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal. Artinya, sekolah, masyarakat, dan keluarga memiliki tanggung jawab masing-masing dalam penguatan pendidikan karakter.

Adapun dalam teknis pelaksanaannya, secara eksplisit Perpres tersebut mengamanatkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah sebagai

pihak yang bertanggung jawab dengan dikoordinir oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Di satu sisi, masyarakat perlu bersyukur sebab Perpres tersebut telah menjadi solusi dan penengah atas polemik yang ada. Namun, di sisi lain, masyarakat tidak boleh lengah bahwa permasalahan karakter bangsa ini tidak akan selesai secara instan dengan adanya Perpres tersebut. Sebab untuk mewujudkan amanat Perpres tersebut, aparat pemerintah bersama masyarakat masih harus kerja keras untuk menerjemahkannya ke dalam program kerja yang konkrit dan terukur.

Melalui tulisan ini, penulis ingin merinci benang merah dan implikasi dari Perpres PPK terhadap Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan kurikulum. Dengan demikian, mulai sekarang ini kita mesti meninggalkan polemik yang kurang sehat tentang full day school untuk bekerja dan fokus pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui standarisasi dan implementasi kurikulum.

Peran BSNP

Sebagaimana kita maklumi bersama, negara Indonesia sejak tahun 2003 menerapkan pendidikan berbasis standar.

*Dosen Fakultas Psikologi UIN Jakarta dan Anggota BSNP 2014-2018

Spirit pendidikan berbasis standar ini dituangkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ada delapan standar nasional pendidikan (**SNP**) yang diamanatkan undang-undang, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

Dari delapan standar tersebut, ada empat standar yang menjadi acuan pengembangan kurikulum, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Keberadaan Perpres tersebut, secara langsung memiliki implikasi terhadap SNP yang menjadi kewenangan BSNP dan kurikulum yang menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hasil evaluasi dan kajian yang dilakukan BSNP selama dua tahun terakhir ini menunjukkan rumusan kompetensi masih terkotak-kotak dalam dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu keterkaitan dan keselarasan antara SKL, Standar Isi (**SI**), Kompetensi Inti (**KI**) dan Kompetensi Dasar (**KD**) yang ada di dalam dokumen kurikulum, masih belum terlihat secara jelas. Artinya, masih ada *missing link* antar standar. Gradasi kompetensi dari jenjang SD/MI sampai ke SMA/MA juga masih kabur, karena hanya dibedakan dengan lingkup wilayah (lokal, nasional, dan internasional), bukan pada substansi keilmuan dan kompetensi. Padahal keberadaan delapan standar nasional tidak dapat dimaknai secara parsial

atau terpisah-pisah, tetapi mesti dimaknai secara menyeluruh.

Menyadari adanya kelemahan standar tersebut, SNP yang ada perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan masa depan. Hasil kajian BSNP juga menunjukkan rumusan kompetensi yang selama ini terpisah-pisah antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga perlu diintegrasikan menjadi satu kesatuan. Artinya, dalam sebuah rumusan kompetensi terdapat sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan porsi atau bobot yang berbeda. Pada satu rumusan, bisa jadi bobot keterampilan lebih dominan dibanding bobot pengetahuan dan sikap. Penyatuan tiga dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan perlu dilakukan sebab ketiga dimensi tersebut bukan merupakan aspek yang tidak saling terpisahkan tetapi saling melengkapi antara satu dengan yang lain.

Selanjutnya, rumusan kompetensi perlu disusun dengan membuat gradasi dari SD/MI, SMP/MTs sampai dengan SMA/MA. Gradasi kompetensi disusun secara lebih operasional, jelas, dan terukur untuk mengidentifikasi pencapaian kemampuan peserta didik antar satuan pendidikan. Artinya, adanya gradasi ini untuk menunjukkan perbedaan kemampuan yang harus dikuasai peserta didik pada masing-masing jenjang.

Selain adanya tiga dimensi kompetensi, sikap pengetahuan dan keterampilan, perlu ditetapkan area kompetensi

untuk memperjelas kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Dalam konteks ini, telah diidentifikasi tujuh area kompetensi, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME, kebangsaan dan cinta tanah air, karakter pribadi dan sosial, kesehatan jasmani dan rohani, literasi, kreativitas, dan estetika. Tujuh area kompetensi tersebut, jika dipetakan akan terlihat sebarannya pada tiga dimensi kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan). Khusus untuk SMK, selain tujuh area tersebut ada tambahan dua area lagi, yaitu kemampuan teknis dan kewirausahaan.

Lebih lanjut, hasil kajian BSNP juga menunjukkan adanya perluasan makna literasi dari membaca dan menulis kepada literasi tentang pengetahuan (*knowledge literacy*) yang meliputi bahasa dan sastra, matematika, sains, sosial budaya, teknologi, informasi dan media serta literasi untuk kehidupan (*literacy for life survival*). Berdasarkan dua pemahaman tentang literasi ini, maka istilah literasi dijadikan satu dari tujuh area kompetensi.

Posisi Kurikulum

Secara konseptual, dalam rangka penerapan pendidikan karakter, ada tiga aspek yang perlu penguatan dalam struktur kurikulum, yaitu substansi keilmuan, karakter, dan budaya.

Penguatan substansi keilmuan ini tercermin dari rumusan SKL dan Standar Isi pada dokumen SNP dan rumusan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada dokumen kurikulum. Dokumen SNP disiapkan oleh BSNP sebagai lembaga

independen dan profesional, sedangkan dokumen kurikulum disiapkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pola pikir yang perlu diluruskan adalah kurikulum mengikuti SNP, bukan SNP mengikuti kurikulum. Penguatan karakter bisa dilakukan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler secara terpadu dan proporsional. Penguatan budaya menjadi tanggungjawab tiga institusi pendidikan, yaitu formal, nonformal, dan informal. Peran masyarakat, pemerintah, guru, orang tua siswa menjadi sangat penting.

Oleh karena itu, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tepatnya Puskurbuk dan Puspendik bersama BSNP, perlu menyusun peta jalan pengembangan SNP serta implimentasinya dalam proses

pembelajaran dan penilaian, khususnya penyiapan dokumen yang menjadi basis implementasi kurikulum. Dengan demikian, implementasi kurikulum 2013, secara efektif dan tertata dari hulu hingga ke hilir, dapat diterapkan pada awal 2019. Hal ini akan menjadi warisan (*legacy*) yang akan dikenang dalam sejarah pendidikan nasional.

Setelah dokumen SNP, kurikulum, dan buku teks pelajaran disiapkan, pekerjaan rumah berikutnya yang perlu diselesaikan adalah peningkatan kompetensi guru. Bagian ini menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbud. Dalam penanaman karakter, keteladanan dari seorang guru menjadi kunci utama. Sebab penanaman karakter tidak bisa hanya sekedar diajarkan, tetapi harus dilakukan melalui keteladanan. (BS)



Sesuai perkembangan pengetahuan dan tuntutan masa depan, makna literasi dalam standar nasional pendidikan diperluas dari literasi membaca dan menulis kepada literasi tentang pengetahuan (*knowledge literacy*) yang meliputi bahasa dan sastra, matematika, sains, sosial budaya, teknologi, informasi dan media serta literasi untuk kehidupan (*literacy for life survival*).

PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL 2018

Bukan Sekedar Tanggungjawab Konstitusional, Tetapi Juga Tanggungjawab Moral

Ujian Nasional (UN) tahun 2018 tetap akan dilaksanakan. BSNP sebagai lembaga independen dan mandiri yang memiliki kewenangan menyelenggarakan UN telah melakukan berbagai persiapan dari segi kebijakan publik. Beberapa upaya juga telah dilakukan untuk melakukan perbaikan pelaksanaan UN. Tim Buletin BSNP melakukan wawancara dengan ketua BSNP untuk menggali lebih jauh tentang kebijakan tersebut.

Bisa dijelaskan, bagaimana posisi Ujian Nasional dalam Sistem Pendidikan Nasional?

Sistem pendidikan nasional yang diterapkan di negara kita adalah pendidikan berbasis standar. UN merupakan sub-sistem penilaian dalam standar nasional pendidikan. UN menjadi salah satu tolak ukur pencapaian standar nasional pendidikan dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. UN diselenggarakan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan pada jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai hasil proses pembelajaran. Melalui UN diharapkan lahir generasi muda yang kompeten, unggul, dan berdaya saing baik dalam ranah nasional maupun global.

Apa hubungan UN dengan Pendidikan Karakter?

Pelaksanaan ujian nasional tidak sekedar tanggungjawab konstitusional, tetapi juga tanggung jawab moral. Tanggungjawab moral ini jauh lebih berat dari tanggungjawab konstitusional. UN selain sebagai instrumen untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik, juga sebagai instrumen untuk menanamkan nilai-nilai moral terutama kejujuran. **Prestasi Penting, Jujur yang Utama.**

Bagaimana gambaran pelaksanaan UN masa depan?

Moda utama pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2018 adalah dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). UNBK dilaksanakan pada satuan pendidikan formal dan nonformal. Mengapa UNBK? UNBK sudah terbukti efektif untuk meningkatkan kejujuran di kalangan peserta didik dalam mengikuti ujian nasional, sehingga hasilnya benar-benar menggambarkan kompetensi siswa yang obyektif. Ke depan, kita bercita-cita adanya UN yang dapat dipercaya (*credible*), dapat diterima (*acceptable*), dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).

Apa kebijakan mendasar untuk pelaksanaan UN 2018?

Pada tahun 2018 akan ada soal isian singkat untuk mata pelajaran matematika pada jenjang SMA/MA dan SMK. Adanya soal isian singkat ini dimaksudkan supaya peserta didik tidak terpaku dengan satu pilihan jawaban dalam mengerjakan soal. Artinya, soal ini menuntut mereka untuk mampu melakukan berpikir tingkat tinggi atau *higher order thinking skills* (HOTS). Selain itu, pelaksanaan UN gelombang II hanya dimaksudkan untuk mereka yang akan memperbaiki nilai, termasuk peserta dari pendidikan kesetaraan.

Mengapa kebijakan tersebut hanya diterapkan untuk siswa SMA/MA dan SMK?

Ke depan, secara bertahap, soal isian singkat tersebut akan diterapkan pada jenjang pendidikan yang lain, seperti SMP/MTs. Namun, pada saat ini dicoba untuk jenjang SMA/MA dan SMK.

Bagaimana pola pelaksanaan sosialisasi UN?

Sosialisasi kebijakan UN dilakukan secara terpusat melalui *training of trainers* (ToT) dengan mengundang perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Kantor Wilayah Kementerian Agama. Dengan pola ini, BSNP tidak lagi akan melakukan sosialisasi ke daerah, sebab peran tersebut sudah dilakukan oleh nara sumber yang sudah dilatih dalam ToT tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan, jika daerah memerlukan nara sumber dari Pusat, mereka tetap boleh mengundang nara sumber dari pusat.

Apa moda utama pelaksanaan UN 2018?

UN tahun 2018 dilaksanakan dengan moda UNBK, termasuk untuk pendidikan kesetaraan. Tahun 2018 merupakan tahun



Pembahasan POS Ujian Nasional Tahun 2018 di BSNP bersama Balitbang dan Puspendik.

ke-4 bagi pendidikan formal dan tahun ke-2 bagi pendidikan kesetaraan untuk pelaksanaan ujian dengan moda UNBK. Diproyeksikan pada jenjang SMA sederajat, pelaksanaan UNBK sudah 100 persen, sedangkan pada jenjang SMA sederajat masih sekitar 70 persen.

Apa Bapak yakin target tersebut bisa dicapai mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam dan adanya keterbatasan jaringan internet atau pasokan daya listrik?

BSNP bersama Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama telah melakukan pendataan sekolah atau madrasah yang sanggup melaksanakan UNBK, sehingga berani membuat target. Bahwa di daerah tertentu ada kendala jaringan internet, Puspendik telah mengantisipasi kemungkinan dilakukan UNBK secara offline, selama fasilitas komputer memadai. Terkait dengan pasokan daya listrik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selama ini telah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk memastikan tidak ada pemadaman listrik pada saat pelaksanaan UNBK.

Bagaimana penerapan berbagi sumber dalam pelaksanaan UNBK?

Untuk mendorong satuan pendidikan menerapkan berbagi sumber dalam pelaksanaan UNBK, salah satu kebijakan yang dibuat BSNP adalah dengan menyusun jadwal UN yang berbeda untuk masing-masing jenjang. Sebagai contoh, jadwal pelaksanaan UN SMK/MAK dilaksanakan pada tanggal 2-5 April 2017, sedangkan UN SMA/MA pada tanggal 9-12 April 2018 dan UN SMP/MTs pada tanggal 23-26 April 2018. Dengan pola seperti ini, prinsip berbagi sumber dalam dilakukan antar jenjang pendidikan. Peserta UN dari SMA misalnya, bisa menggunakan fasilitas milik SMK atau sebaliknya.

Apa upaya yang dilakukan BSNP untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan UN?

Kisi-kisi UN ditetapkan lebih awal, yaitu pada bulan Agustus 2017 dan disosialisasikan ke publik. Peningkatan kualitas soal dengan menerbitkan POS penelaahan soal ujian sebagai panduan bagi Puspendik. Pendataan peserta ujian dilakukan secara terintegrasi di Data

Pokok Pendidikan (DAPODIK) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Education Management Information System (EMIS) di Kementerian Agama. Penguatan peran Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dalam pelaksanaan UN. Selain itu, berbagai praktik baik dalam pelaksanaan USBN yang dilakukan oleh satuan pendidikan atau daerah, disampaikan kepada publik untuk dijadikan pelajaran.

Bisa diuraikan lebih lanjut, penguatan peran apa yang diberikan kepada LPMP?

Mulai tahun 2018, LPMP akan melakukan pemindaian LJUN untuk SMA/MA dan SMK bagi satuan pendidikan yang masih melakukan UN berbasis kertas dan pensil. Hal ini dilakukan karena LPMP sebagai pihak yang independen dalam pengendalian mutu pendidikan, sehingga tidak memiliki kepentingan langsung terhadap hasil ujian, dibandingkan dengan dinas pendidikan provinsi yang memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap pengelolaan pendidikan pada jenjang SMA/MA dan SMK.

Ada pesan khusus untuk calon peserta dan panitia pelaksana UN 2018?

Kepada para peserta didik: Persiapkan diri dengan sebaik mungkin dan penuh percaya diri. Yakin, Anda pasti bisa. Utamakan kejujuran dalam mengikuti ujian nasional. Kepada pelaksana UN mulai dari tingkat pusat sampai ke satuan pendidikan: Laksanakan Ujian Nasional sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan UN. Berikan layanan yang berkualitas. Utamakan integritas.

PENERBIT ANTUSIAS MENDAFTARKAN PENILAIAN BTP SECARA DARING Sebanyak 1.316 Jilid Buku Diterima Puskurbuk

Usaha perbaikan dan peningkatan kualitas penilaian buku teks pelajara selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu, tidak hanya dari segi kebijakan, tetapi juga dari segi teknis pelaksanaan. BSNP bekerjasama dengan Puskurbuk, melakukan sebuah inovasi untuk proses pendaftaran penilaian buku teks pelajaran. Pendaftaran yang selama ini dilakukan secara manual, kini dilakukan secara daring (*online*).

Menurut Supriyatno Kepala Bidang Perbukuan Puskurbuk melalui cara ini diharapkan proses pendaftaran tidak lagi dilakukan secara tatap muka yang memerlukan waktu dan biaya yang lebih banyak.

“Pendaftaran *online* ini salah satu bentuk inovasi perubahan kebijakan di bidang perbukuan. Melalui cara ini kita dapat meningkatkan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya”, ucapnya dalam rapat pleno BSNP.

Sebagaimana telah diumumkan oleh Balitbang dan BSNP, proses pendaftaran penilaian buku teks pelajaran kelas I (16 jilid), IV (18 jilid), VII (14 jilid), dan X (12 jilid) dimulai pada tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan 10 Oktober 2017. Penilaian buku teks pelajaran ini terbuka bagi penerbit. Penerbit dapat mendaftarkan buku untuk dinilai kelayakannya ke Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Pengurus IKAPI Pusat beraudiensi dengan Anggota BSNP untuk membahas kebijakan pemerintah dibidang perbukuan (6/11/2017).

selaku Sekretariat Penyelenggara Penilaian Buku Teks Pelajaran. Pendaftaran akan dilaksanakan secara daring (*online*) di laman <https://penilaian.buku.kemdikbud.go.id>

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan Puskurbuk, ada 61 penerbit yang ikut pendaftaran dengan jumlah buku yang diajukan sebanyak 1.316 jilid. Setelah dilakukan verifikasi ada 56 penerbit yang dinyatakan layak dengan jumlah buku 1.152 jilid.

Menurut Syamsunisa staf Puskurbuk, banyaknya buku yang didaftarkan menunjukkan antusiasme penerbit untuk mengikuti penilaian yang akan dilakukan pada tahun 2018.

“Penerbit sangat antusias mengikuti proses penilaian buku teks pelajaran. Hal ini menunjukkan dunia perbukuan atau penerbitan cukup bagus”, ucap Syamsunisa di sela-sela rapat pleno BSNP (18/12/2017).

Lebih lanjut, Syamsunisa menambahkan diantara sebab buku yang diajukan tidak lolos verifikasi karena jumlah buku yang dikirimkan tidak sesuai dengan jumlah yang diminta. Seharusnya setiap judul enam eksemplar, dua diantaranya dengan indentitas lengkap. Ada juga penerbit yang hanya mengirimkan buku siswa, tanpa buku guru serta tidak menyerahkan *soft file* fisik buku.

UJI PUBLIK RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI GURU SMK/MAK Exit Criteria Bagi LPTK dan Entry Criteria Bagi Ditjen GTK

Rancangan standar kompetensi guru produktif SMK/MA mendapat sambutan positif dari para dosen, widiaiswara, dan guru yang terlibat dalam kegiatan responden uji publik pada tanggal 23-25 Oktober di Jakarta. Turut hadir dalam acara ini 168 orang perwakilan dari berbagai universitas, PATK, SMK, dan Direktorat terkait di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari anggota BSNP yang turut hadir dalam acara ini adalah Erika Budiarti Laconi, Kiki Yuliati, Khomsiah, dan Bambang Suryadi.

Rancangan standar ini dikembangkan oleh BSNP bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan adanya standar ini, diharapkan adanya peningkatan kualitas guru yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas lulusan dan daya saing lulusan SMK/MAK.

Dalam sambutannya, Bambang Suryadi Ketua BSNP mengatakan bahwa penyusunan standar ini merupakan bentuk respon konkrit terhadap Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan.

“Sampai tanggal 6 September 2017 yang lalu Inpres tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan sudah berjalan selama satu tahun. Oleh karena itu, pengembangan standar kompetensi guru SMK/MAK ini merupakan tindakan konkrit yang dilakukan BSNP bersama

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam merespon Inpres tersebut”, ucapnya di hadapan 168 peserta uji publik yang mewakili berbagai unsur pemangku kepentingan bidang pendidikan.

Dalam konteks pendidikan berbasis standar, tambah Bambang, peningkatan kualitas guru SMK/MAK mesti dimulai dari pengembangan standar. Jika selama ini, standar kompetensi guru SMK/MAK disamakan dengan standar kompetensi guru SMA/MA, maka mulai tahun ini standar kompetensi guru SMK/MAK dibuat tersendiri.

“Pendidikan menengah kejuruan memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari pendidikan menengah umum. Lulusan SMK/MAK disiapkan untuk bekerja di dunia usaha dan industri, sedangkan lulusan SMA/MA disiapkan untuk melanjutkan studi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan standar kompetensi guru yang sesuai dengan karakteristik pendidikan menengah kejuruan”, ujar Bambang seraya menambahkan standar kompetensi disusun secara berjenjang berdasarkan jabatan fungsional guru, yaitu guru pertama, muda, madya, dan utama.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan perbedaan dan persamaan antara standar kompetensi guru SMK/MAK dan SMA/MA. Guru normatif memiliki kompetensi yang sama dengan guru SMA/MA untuk seluruh aspek kompetensi, yaitu kepribadian, sosial, pedagogik, dan

professional. Guru adaptif dan produktif memiliki kompetensi yang sama dengan guru SMA/MA pada aspek kepribadian dan sosial, tetapi mereka memiliki kompetensi yang berbeda pada aspek pedagogik dan profesional.

Pengembangan standar kompetensi guru SMK/MAK memiliki implikasi terhadap kebijakan di LPTK dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Bagi LPTK, standar kompetensi guru SMK/MAK merupakan exit criteria, artinya setiap lulusan dari program pendidikan guru pada LPTK harus memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Oleh karena itu, proses pembelajaran, muatan kurikulum, dan penilaian yang ada di LPTK perlu diselaraskan dengan standar yang ada. Bagi pihak Direktorat Jenderal Guru dan tenaga pendidik, standar ini merupakan *entry criteria* yang dijadikan acuan dalam melakukan rekrutmen guru, materi pelatihan, dan uji kompetensi guru.

Sementara itu, Sri Renani Pantjastuti Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dalam arahannya mengatakan bahwa hasil yang diharapkan dari kegiatan uji public ini adalah penyamaan konsep dan persepsi terhadap isi kerangka standar kompetensi guru SMK/MAK dari setiap kompetensi, elemen kompetensi, dan kompetensi berdasarkan jenjang jabatan guru. Standar ini dikembangkan berbasis 48 program keahlian yang ada pada spektrum pendidikan menengah kejuruan. (BS)

SEKOLAH PELAKSANA UNBK 2018

Diproyeksikan SMA/MA Sederajat 100 Persen dan SMP Sederajat 70 Persen

Pusat Penilaian Pendidikan (**Puspendik**), Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan BSNP menyelenggarakan rapat koordinasi tim teknis Ujian Nasional Berbasis Komputer (**UNBK**) pada tanggal 25-28 Oktober 2018 di Jakarta. Acara ini diikuti oleh 253 peserta dari unsur LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Pustekkom.

Dadang Sudiarto Sekretaris Balitbang sekaligus sebagai Plt. Kepala Puspendik dalam sambutannya mengatakan bahwa UNBK merupakan sistem ujian nasional yang diyakini efektif untuk mengukur mutu pendidikan. Melalui UNBK bisa dibentuk perilaku jujur dan menjadikan sekolah sebagai zona integritas, sehingga hasilnya menggambarkan kemampuan siswa yang sebenarnya dan dapat dijadikan dasar pemetaan mutu pendidikan yang obyektif.

“UNBK sudah terbukti efektif untuk meningkatkan perilaku jujur di kalangan peserta didik dalam mengikuti ujian nasional, sehingga hasilnya benar-benar menggambarkan kompetensi siswa yang obyektif”, ucap Dadang Sudiarto.

Selama tiga tahun terakhir, tambah Dadang, telah terjadi pertumbuhan sekolah pelaksana UNBK secara signifikan. Pada tahun 2018, diproyeksikan tingkat pelaksanaan UNBK pada



Peserta UNBK dari Program paket C mengikuti Ujian Nasional di SMKN 20 Jakarta, Pelaksanaan UNBK ini dilakukan dengan prinsip berbagi sumber (resource sharing).

jenjang SMA/MA, SMK, dan Paket C mencapai 100 persen, sedangkan pada jenjang SMP/MTs dan Paket B diproyeksikan mencapai 70 persen. UN tahun 2018 diproyeksikan melibatkan oleh 7.780.000 siswa dari 98.934 sekolah/madrasah.

Lebih lanjut, Dadang mengatakan bahwa peningkatan satuan pendidikan pelaksana UNBK ini selain didukung dengan infrastruktur yang memadai juga didukung dengan perluasan pelaksanaan berbagi sumber (*resource sharing*). Supaya prinsip berbagi sumber dalam dilaksanakan dengan efektif, jadwal ujian jenjang SMK, SMA/MA dan SMP/MTs dilakukan pada hari dan tanggal yang berbeda. Sekolah yang belum memadai sarana komputernya bisa menggunakan fasilitas komputer milik satuan pendidikan lain.

Selain itu, tambahnya, juga akan diadakan simulasi UNBK sebelum ujian. Pelaksana UN juga akan memperkuat peranan helpdesk UNBK di setiap provinsi dan kabupaten/kotai. Kerjasama teknis dengan universitas, PLN, Telkom, Lemsaneg, dan instansi lain juga ditingkatkan.

Sementara itu, Bambang Suryadi Ketua BSNP berpandangan bahwa meningkatnya satuan pendidikan pelaksana UNBK 2018, di satu sisi dianggap sebuah kesuksesan, tetapi di sisi lain kompleksitas pelaksanaan semakin meningkat. Artinya, UNBK memberikan peluang dan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini menjadi sangat penting untuk

mensukseskan pelaksanaan UNBK tahun 2018.

Salah satu aspek persiapan yang mesti dilakukan dengan matang adalah pendataan calon peserta UN. Menurut Dadang, setelah rapat koordinasi ini, akan dilakukan koordinasi data peserta ujian dengan Direktorat terkait dan Kementerian Agama. Ditargetkan pendaftaran calon peserta UN tuntas pada minggu ketiga Desember 2017. Penetapan Daftar Nomisiasi Tetap (DNT) peserta UN pada minggu pertama dan kedua bulan Januari 2018.

Seluruh proses pendaftaran peserta UN mesti dilakukan melalui Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Data yang sudah masuk di DAPODIK akan ditransfer di BioUN yang ditangani oleh Puspendik untuk dilakukan verifikasi akhir dan selanjutnya dinyatakan sebagai DNT UN tahun 2018.

“Proses pendataan yang terintegrasi di DAPODIK ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap peserta UN benar-benar telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Prosedur Operasional Standar (POS) UN”, ucap Bambang.

Sementara itu, Kiki Yuliati Sekretaris BSNP dalam sesi tanya jawab menjelaskan bahwa pendataan peserta UN yang dilakukan secara khusus atau di luar ketentuan POS, hanya dilakukan melalui Dinas Pendidikan atau Direktorat terkait, tidak langsung dilakukan oleh satuan pendidikan. Sebagai

contoh, satuan pendidikan yang tidak bisa melaksanakan UNBK karena alasan tertentu, proses pengusulan ke pelaksana UN Tingkat Pusat harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan, bukan oleh satuan pendidikan. (BS)



**UNBK
sudah
terbukti
efektif**

untuk meningkatkan perilaku jujur di kalangan peserta didik dalam mengikuti ujian nasional, sehingga hasilnya benar-benar menggambarkan kompetensi siswa yang obyektif

**Dadang Sudiyarto,
Plt Kepala Pusat
Penilaian Pendidikan**

PENGUATAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

Kompetensi Lulusan Menjadi Barometer Kualitas Pendidikan

Sampai akhir Desember 2017 ini, Instruksi Presiden tentang Revitalisasi Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) telah berjalan selama satu tahun tiga bulan. Sebagaimana kita ketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat instruksi khusus dalam melakukan revitalisasi pendidikan menengah kejuruan. Salah satu penerjemahan instruksi tersebut adalah pengembangan standar nasional pendidikan untuk SMK yang kewenangannya ada pada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

Pada tahun ini, BSNP mengembangkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) SMA/MAK. Pengembangan standar ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Pembinaan SMK. Totok Suprayitno Kepala Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan apresiasi terhadap rancangan SKL untuk pendidikan menengah kejuruan. Hal tersebut disampaikan Kepala Balitbang pada saat menyampaikan arahan dalam acara uji publik rancangan SKL SMK/MAK di Jakarta beberapa waktu yang lalu

“Rumusan SKL yang ada ini sudah tepat dan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan rumusan SKL sebelum ini.

Dengan adanya SKL SMK/MAK yang baru ini diharapkan kompetensi lulusan SMK/MAK dapat memenuhi tuntutan dunia usaha dan industri”, ucap Totok di hadapan para tim ahli dan penelaah dari kalangan akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan pendidikan.

Lebih lanjut Totok mengingatkan bahwa perkembangan pendidikan menengah kejuruan tidak cukup dilihat dari segi kuantitas, yaitu banyaknya jumlah peserta didik atau sekolah yang didirikan, tetapi juga memperhatikan kualitas lulusan.

“Sekarang ini tidak saatnya lagi menilai pendidikan dari segi kuantitas siswa atau satuan pendidikan. Kualitas pendidikan lebih tepat dilihat dari kompetensi para lulusan yang dihasilkan dan serapan mereka di dunia kerja. Artinya, kompetensi lulusan menjadi barometer kualitas pendidikan”, ucapnya.

Pada kesempatan tersebut Kepala Balitbang juga memberikan pesan kepada para tim ahli agar dalam merumuskan kompetensi tersebut memperhatikan tiga kompetensi utama untuk keberlangsungan hidup (*core competence for survival*), yang mencakup *learning skills*, *adaptability competence* dan *job specific skills*.

“Lulusan SMK/MAK tidak hanya disiapkan secara khusus

untuk memenuhi keterampilan bekerja (*job specific skills*), tetapi juga harus dibekali dengan keterampilan belajar (*learning skills*) dan kemampuan menyesuaikan diri atau *adaptability competence*”, ucap Totok.

Tantangan Lulusan SMK

Sementara itu, Bambang Suryadi Ketua BSNP dalam sambutannya menyampaikan bahwa pendidikan SMK

“
Sekarang
ini tidak
saatnya

lagi menilai
pendidikan dari segi
kuantitas siswa atau
satuan pendidikan.
Kualitas pendidikan
lebih tepat dilihat
dari kompetensi
para lulusan yang
dihasilkan dan
serapan mereka di
dunia kerja.

Totok Suprayitno
Kepala Balitbang
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan

merupakan terminal program yang lulusannya disiapkan untuk memasuki dunia kerja. Oleh karena itu selama proses pendidikan mereka harus dibekali dengan kompetensi sesuai tuntutan dunia kerja.

Sebaliknya, tambahnya, lulusan SMA disiapkan untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun pada kenyataannya, justru lulusan SMA yang banyak diserap di dunia kerja dibanding lulusan SMK. Bahkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan pada bulan Mei 2017 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk usia 15

tahun ke atas berdasarkan latar belakang pendidikan, lulusan SMK menempati posisi tertinggi, yaitu 9.84 persen. Posisi kedua adalah lulusan Diploma I/II/III sebanyak 7.22 persen, lulusan SMA sebanyak 6.95 persen, dan lulusan universitas sebanyak 6.22 persen. Sementara TPT terendah adalah pada tingkat pendidikan SD, yaitu 3.44 persen. Hal ini dikarenakan mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apapun, sementara mereka yang berpendidikan lebih tinggi cenderung memilih pekerjaan yang sesuai.

“Tantangan lulusan SMK sangat berat dan ini menjadi

tanggungjawab kita bersama untuk menyiapkan lulusan yang terampil dan berdaya saing”, ucap Bambang.

Menurut Bambang standar kompetensi lulusan SMK ini selain memiliki implikasi terhadap kurikulum dan buku teks pelajaran, juga memiliki implikasi terhadap uji kompetensi terhadap siswa SMK. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian antara materi yang dipelajari para siswa SMK dan materi uji kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bawah koordinasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).



Siswa pada Kompetensi Tata Boga di salah satu SMK swasta di Kabupaten Bogor melakukan praktik kerja di laboratorium. Dengan proses pembelajaran seperti ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, unggul dan berdaya saing.

IKAPI SAMBUT BAIK PENGADAAN BTP DENGAN POLA INISIATIF MASYARAKAT

Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) menyambut baik pengadaan buku teks pelajaran dengan pola inisiatif masyarakat (*bottom up*). Dengan pola ini memungkinkan para penerbit untuk menyediakan buku teks pelajaran yang bermutu, murah, dan merata bagi para peserta didik. Pola ini juga memberikan waktu penulisan buku teks yang lebih fleksibel. Namun di sisi lain para penerbit, penulis, dan editor dituntut untuk lebih memberikan komitmen dalam menghasilkan buku yang berkualitas.

Demikian catatan penting dari acara “Seminar Sehari Tentang Pembekalan Kepada Penulis dan Editor Mengenai Implementasi Prinsip-Prinsip Kurikulum 2013 dalam Buku Teks Pelajaran di Solo pada hari Sabtu (28/10/2017). Tema seminar ini adalah “Menyukseskan Penilaian Buku Teks Pendamping Kelas I, IV, VII, dan X”.

Acara ini diselenggarakan oleh IKAPI Jawa Tengah dan dihadiri 190 orang mewakili unsur penulis, editor, dan pengelola penerbitan dari 45 penerbit di Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Turut hadir dalam acara ini adalah Rosidayati Rozalina Ketua Umum IKAPI Pusat serta tiga nara sumber, yaitu Bambang Suryadi Ketua BSNP, Supriyatno Kepala Bidang Perbukuan Pusat Kurikulum dan Perbukuan (**Puskurbuk**), dan Sugiarto Dosen Universitas Negeri Semarang.

Supriyatno Kepala Bidang Perbukuan dalam paparannya menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang perbukuan. Melalui RPP ini Pemerintah akan menerjemahkan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan ke dalam kebijakan yang lebih operasional.

“Ada enam aspek penting dalam RPP Perbukuan, yaitu sertifikasi dan akreditasi, kode etik, standar dan kaidah, penghargaan, serta pengawasan yang terkait dengan sistem perbukuan nasional”, ucap Supriyatno.

Penyusunan Peraturan Pemerintah ini, tambah Supriyatno, ditargetkan selesai pada akhir tahun 2017. Dengan adanya peraturan ini diharapkan terwujud buku teks pelajaran yang memiliki kriteria 3M, yaitu mutu, murah, dan merata.

Sementara itu, Bambang Suryadi Ketua BSNP dalam paparannya menjelaskan bahwa salah satu kebijakan strategis BSNP dalam proses penilaian buku teks pelajaran adalah dengan menerapkan pola inisiatif masyarakat (*bottom up*) dan pendaftaran yang dilakukan secara daring (*online*).

“Kebijakan ini (pola inisiatif masyarakat) dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan pihak

swasta dalam pengadaan buku teks pelajaran yang berkualitas dari aspek isi, penyajian, bahasa, dan kegrafikaan sesuai dengan paradigma kurikulum yang diterapkan. Sedangkan pola pendaftaran *online* dimaksudkan untuk mengurangi interaksi langsung antara pihak penerbit dan pembuat kebijakan”, ucapnya.

Ketika ditanya tentang revisi standar yang dilakukan BSNP pada tahun ini untuk standar kompetensi lulusan dan standar isi, Bambang menegaskan bahwa perubahan ini tidak dimaksudkan untuk mengubah Kurikulum 2013, tetapi justru untuk mempermudah dan memfasilitasi para guru dalam menerapkan kurikulum tersebut. Namun demikian, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan (*policy adjustment*) terhadap dokumen kurikulum yang berimplikasi pada buku teks pelajaran.

Tomy Utomo Ketua IKAPI Jawa Tengah dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah telah membuka pendaftaran penilaian buku teks pelajaran untuk kelas I, IV, VII, dan X mulai tanggal 1 sampai dengan 10 Oktober 2017. Ada 60 pasang buku (30 buku siswa dan 30 buku guru) untuk dilakukan penilaian. Para penerbit diberi kesempatan untuk menyusun buku teks tersebut dalam waktu dua bulan dan harus menyerahkan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Desember 2017 untuk dilakukan penilainya.

“Ini merupakan peluang emas bagi para penerbit untuk berpartisipasi dalam pengadaan buku teks pelajaran. Namun, kondisi ini juga menjadi tantangan bagi penerbit, sebab jumlah buku yang diadakan cukup banyak, sementara waktunya sangat singkat”, ucap Tomy Utomo seraya menambahkan di Jawa Tengah saat ini ada 150 penerbit dan dari jumlah tersebut sekitar 70 persen yang bergerak dalam pengadaan buku teks pelajaran sekolah.

Oleh karena itu, tambah Tomy, forum ini sangat penting bagi para calon penulis dan editor untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang penyusunan buku teks pelajaran dengan pola inisiatif masyarakat. Respon peserta juga sangat tinggi, sehingga panitia sempat menolak keikutsertaan peserta karena terbatasnya tempat pelaksanaan.

Meskipun jumlah buku yang akan dinilai cukup banyak, pihak penerbit bisa mengusulkan buku teks pelajaran sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Dengan demikian, setiap penerbit tidak mesti menyusun 60 pasang buku, tetapi bisa seberapa saja sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya.

Sementara itu, Rosidayati Rozalina Ketua Umum IKAPI Pusat dalam sambutannya mengatakan bahwa tinggi antusiasme peserta dalam kegiatan ini menunjukkan industri penerbitan buku di daerah berkembang dengan pesat. Peran IKAPI adalah memberikan pembinaan melalui lokakarya, seminar, pameran, dan workshop tentang buku teks pelajaran. Selain itu, IKAPI juga memiliki kewajiban untuk



Dari kiri ke kanan, Tomy Utomo Ketua IKAPI Jawa Tengah, Bambang Suryadi Ketua BSNP, Rosidayati Rozalina Ketua Umum IKAPI, dan Supriyatno Kepala Bidang Perbukuan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemdikbud.

mengawal kebijakan pemerintah tentang pengadaan buku teks pelajaran, termasuk penerapan kode etik bagi para penerbit, penulis, dan editor.

Lebih lanjut Ida panggilan akrab Ketua Umum IKAPI menyampaikan beberapa harapan kepada BSNP dan Puskurbuk. Pemerintah diharapkan dapat menyampaikan perubahan kebijakan standar nasional pendidikan dan kurikulum kepada para penerbit dengan segera sehingga mereka bisa menyesuaikan dengan *policy adjustment* yang terkait dengan pengadaan buku teks pelajaran. Selain itu, homogenitas penilai juga perlu diperhatikan sehingga tidak ada penilai buku teks pelajaran yang memberikan nilai ekstrim, yaitu terlalu rendah

atau terlalu tinggi. Lebih penting lagi, umpan balik dari tim penilai untuk buku yang dinyatakan tidak layak perlu disampaikan kepada para penulis, editor, dan penerbit sehingga bisa dilakukan perbaikan. (BS)



Uji publik rancangan Standar Kompetensi Lulusan SMK/MAK di Jakarta (20-21/10/2017). Dengan adanya SKL SMK/MAK yang baru ini diharapkan kompetensi lulusan SMK/MAK dapat memenuhi tuntutan dunia usaha dan industri.



Suasana pembahasan POS Ujian Nasional tahun 2018 di ruang rapat BSNP. Acara dihadiri oleh tim UN dari BSNP dan Puspendik. Plt Kepala Puspendik Dadang Sudiyarto (kiri, menghadap lensa) menjelaskan kebijakan strategis UN 2018.



Suasana kerja tim ahli standar isi untuk muatan pendidikan agama dan budi pekerti di ruang rapat BSNP. Tim ahli mewakili enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghuchu.



Pembahasan persiapan Ujian Nasional Gelombang II di ruang rapat Balitbang Kemdikbud. Turut hadir dalam acara ini seluruh anggota BSNP, Ketua dan Sekretaris Balitbang. UN Gelombang II dilaksanakan bulan Oktober 2017 dengan moda Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

LENSA



Kepala SMKN 20 Jakarta (kelima dari kiri) berpose bersama dengan para pengawas satuan pendidikan, dan pegawai dari Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta, se usai pelaksanaan UN Gelombang II pada hari Kamis, 12 Oktober 2017.



Penilaian buku teks pelajaran Matematika dan PJOK Kelas VI SD/MI di Puskurbuk. Kegiatan ini melibatkan tim penilai dari ahli materi dan pembelajaran serta tim pengembang instrumen.



Pembahasan Rancangan POS USBN tahun 2018 di BSNP, Melibatkan Direktorat terkait di kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama.



Pejabat dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya berdialog dengan BSNP tentang beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Ujian Nasional di ruang rapat BSNP.



<http://www.bsnp-indonesia.org>